



**PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)  
PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2024**



**DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA BANJAR**

**Jl. R.E. Kosasih No. 27 Telp. (0265) 7549016  
Kota Banjar**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja SKPD) untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD).

Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Banjar adalah dokumen perencanaan untuk penyesuaian perencanaan tahunan yang diawali penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, penyusunan rancangan Perubahan Renja yang mengacu pada Renstra Dinas Perhubungan tahun 2024 - 2026 dan Rancangan Awal Perubahan RKPD 2024.

Perubahan dalam Renja Tahun 2024 memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, dan perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, Perubahan Renja didasarkan pada hasil evaluasi Renja Dinas Perhubungan Kota Banjar sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Perubahan Renja Tahun 2024 disusun sebagai bahan acuan penyusunan RKA Perubahan Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan tujuan Dinas Perhubungan Kota Banjar.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perhubungan Kota Banjar disusun atas dasar landasan hukum sebagai berikut :



1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006. Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
7. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat
20. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar Tahun 2013-2033;
21. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjar Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 28);
22. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
23. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 42 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.
24. Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
25. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2023 Tentang RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2024-2026
26. Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2023 Tentang RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
27. Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2023 Tentang RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024



### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun 2024 disusun dengan maksud :

1. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Banjar Tahun 2024;
2. Untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima Tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional;
3. Untuk melaksanakan amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap OPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman dalam 1 (satu) tahun.

#### **1.3.2 Tujuan**

Maksud penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun 2024 adalah sebagai pedoman penyusunan RKA Perubahan SKPD Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun Anggaran 2024 dan sebagai tolak ukur penilaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Banjar pada tahun 2024. Tujuan penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun 2024 adalah :

- a. Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Banjar selama tahun 2024.
- b. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran.
- c. Menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam perencanaan pembangunan daerah.
- d. Mendukung program Pemerintah Pusat (Kemenhub) dan Pemerintah Provinsi berkaitan dengan pembangunan bidang perhubungan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Banjar tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP



## BAB II

### EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, demikian halnya dengan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun 2024.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja OPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjar pada Tahun 2024 tetap mengacu pada pencapaian indikator program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun 2024-2026 maupun dalam RPD Kota Banjar Tahun 2024. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) hasil pergeseran anggaran, yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar Tahun anggaran 2024 dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, Dinas Perhubungan Kota Banjar mendapatkan alokasi belanja sebesar Rp. 16.066.828.415,- (*enam belas milyar enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima belas rupiah*) untuk melaksanakan 2 Program yang dijabarkan dalam 13 kegiatan dan 31 sub kegiatan.

Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun 2024-2026.

Pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjar, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024



telah dilaksanakan sebanyak 2 Program yang dijabarkan dalam 13 kegiatan dan 31 sub kegiatan. Adapun tingkat pencapaian kinerja program/ kegiatan indikator program utama masing-masing realisasinya adalah sebagai berikut :

1. Realisasi program/ kegiatan yang belum memenuhi target kinerja atau capaiannya masih rendah bahkan sangat rendah hasil/ keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
  - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - f. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
  - g. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
  - h. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
  - i. Penerbitan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan fasilitas Parkir
  - j. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
  - k. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :
  - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
  - b. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai dengan saat ini belum ada yang melebihi target kinerja.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja yang direncanakan antara lain :
  - a. Jadwal pelaksanaan kegiatan yang dialihkan dari semester I ke semester II tahun berjalan.
  - b. Adanya refocusing anggaran pada tahun berjalan.
  - c. Adanya perubahan aturan tentang pengadaan barang/ jasa di lingkungan pemerintah.
  - d. Efektifitas waktu pelaksanaan kegiatan.
  - e. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai scedule yang direncanakan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program/ Kegiatan Renstra Perangkat Daerah.



Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Banjar adalah sebagai berikut :

- Perubahan indikator kinerja dan target capaian program/ kegiatan Renstra tentu saja akan mengalami perubahan sesuai dengan kondisi yang ada.
  - Terhadap program/ kegiatan yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra akan berdampak positif bagi kelancaran program pembangunan bidang perhubungan.
  - Terhadap program/ kegiatan yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra, akan berdampak pada laporan kinerja dan realisasi keuangan.
6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :
- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para PPK dan PPTK yang menangani program, kegiatan, dan sub kegiatan.
  - b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah prioritas pagu anggaran Program, Kegiatan, dan sub kegiatan

Adapun Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kota Banjar tahun lalu, dan Realisasi Renstra Dinas Perhubungan Kota Banjar mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan, dapat dilihat pada tabel dengan penjabaran sebagai berikut :





**Tabel 2.1**

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan II dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja OPD tahun 2024	Perubahan target program dan kegiatan (Renja perangkat daerah tahun 2024)	Realisasi program dan kegiatan (Renja perangkat daerah triwulan II tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja OPD Tahun 2024	Realisasi Renja OPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+9)	13=(10/4)
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>8,943,358,262</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>14,86%</b>		
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>52,444,000</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>15,95%</b>		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			15,894,000			2 dokumen	2 dokumen	0 %		



				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			5,298,000				1 dokumen	1 dokumen	0 %		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			5,584,000				1 dokumen	1 dokumen	0 %		
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen			3,884,000				1 dokumen	1 dokumen	0 %		
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			5,324,000				1 dokumen	1 dokumen	0%		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			8,268,000				3 dokumen	3 dokumen	99,18%		
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			8,192,000				4 dokumen	4 dokumen	25 %		
				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tepat waktu</b>			<b>6,059,354,363</b>	<b>3,186,327,482</b>	<b>28,57%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>28,57%</b>		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN penerima Gaji			6,053,856,363	3,186,327,482	21,43%		54 orang	54 orang	21,43%		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan			5,498,000				2 lap	2 lap	0%		





				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			1,509,482,399		41,67 %	100%	100%	41,67 %		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4,980,000		25 %	12 lap	12 lap	25 %		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			376,238,399	71,059,100	50 %	12 lap	12 lap	50 %		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1,128,264,000	515,910,958	50 %	12 lap	12 lap	50 %		
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>503,459,000</b>	<b>43,915,400</b>	<b>15%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>15 %</b>		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			335,100,000	43,915,400	50%	24 unit	24 unit	50 %		
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel			5,000,000			1 paket	1 paket	0,0 %		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			18,540,000			10 unit	10 unit	0 %		
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi			144,819,000			1 unit	1 unit	0 %		



			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>Rasio Konektivitas Kabupaten/kota</b>						<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>20,91 %</b>		
			<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota</b>	<b>Cakupan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>			<b>6,759,360,800</b>	<b>2,683,537,852</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>50,43 %</b>		
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			6,274,240,800	2,436,533,824		12 unit	12 unit	50 %		
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang di Rehabilitasi dan di Pemelihara			485,120,000	247,004,028		116 unit	116 unit	50,86%		
			<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>Cakupan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>			<b>60,000,000</b>	<b>37,51%</b>		<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>50 %</b>		
			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			30,000,000	34,64%		2 dok	2 dok	50 %		



			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			30,000,000	40,38%		2 lap	2 lap	50 %		
			<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	Persentase pelayanan uji berkala kendaraan bermotor			<b>206,524,000</b>	-	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0 %</b>		
			Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang teregistrasi			30,000,000			1500 unit	1500 unit	0 %		
			Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			56,524,000			1500 dok	1500 dok	0 %		
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dipelihara			120,000,000			1 unit	1 unit	0,00%		
			<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota			<b>792,750,000</b>	<b>106,642,900</b>	<b>13,45%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>13,45%</b>		



			Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			150,000,000	75,093,400	50,06 %	6 kali	6 kali	50,06 %		
			Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota			642,750,000	31,549,500	14,97 %	12 kali	12 kali	14,97 %		
			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota						1 kali	1 kali	4,91 %		
			<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	<b>Persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>			<b>60,000,000</b>	-	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>		
			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota			30,000,000			2 laporan	2 laporan	0%		
			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum			30,000,000			2 laporan	2 laporan	0 %		



				<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			<b>30,000,000</b>	-	<b>0 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>0 %</b>		
				Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota			30,000,000			2 laporan	2 laporan	0 %		





Penjelasan dari tabel 2.1 diatas adalah sebagai berikut :

- Penyesuaian nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan yang baru berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
- Pencapaian hasil pelaksanaan Renja OPD dan Renstra OPD tidak terlepas dari adanya faktor pendorong yaitu adanya sistem informasi yang saling terintegrasi.
- Di sisi lain juga terdapat faktor penghambat, yaitu adanya keterbatasan SDM pegawai serta belum berfungsinya Jabatan Fungsional Tertentu (JFT).
- Secara umum capaian target kinerja dan keuangan samapai dengan triwulan II dapat terealisasi dengan baik. Meskipun ada beberapa kegiatan yang hasil capaiannya belum maksimal.

## 2.2 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

RKPD Perubahan adalah salah satu acuan bagi setiap perangkat daerah dalam penyusunan Renja Perubahan OPD, selain RENSTRA OPD. RKPD Perubahan disusun dalam rangka sinkronisasi pembangunan daerah. Oleh karenanya rancangan awal perubahan RKPD seyogyanya diketahui secara umum oleh seluruh OPD untuk dapat disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan OPD terkini.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Dinas Perhubungan Kota Banjar kemudian mereview rancangan awal perubahan RKPD yang disandingkan dengan kebutuhan OPD dengan hasil bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat dalam Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Banjar sudah tercantum semua dalam rancangan awal perubahan RKPD Kota Banjar.

Pada Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun 2024 ini telah disusun sesuai dengan analisa kebutuhan yang ada dan tentu tidak luput dari beberapa pergeseran maupun perubahan angka pagu indikatif. Berikut ini penjelasan hasil review terhadap rancangan awal perubahan RKPD Tahun 2024 :

2.2.1 Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan antara Rancangan Awal Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Bedasarkan hasil review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2024, terdapat kesesuaian 100%. Artinya jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan yang ada dalam Renja sama dengan jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan yang ada pada Rancangan Awal Perubahan



RKPD, yaitu sebanyak 2 Program yang dijabarkan dalam 13 kegiatan dan 31 sub kegiatan.

#### 2.2.2 Kesesuaian besaran pagu anggaran antara Renja Perubahan dan Rancangan Awal Perubahan RKPD.

Bedasarkan hasil review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2023, terdapat kesesuaian 100%. Artinya jumlah pagu anggaran yang ada dalam Renja sama dengan jumlah pagu anggaran dalam Rancangan Awal Perubahan RKPD, yaitu sebesar Rp. 16.632.148.659,- (*Enam belas milyar enam ratus tiga puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh sembilanrupiah*).

Penjelasan dari proses review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan Kota Banjar mendukung pencapaian misi ketiga dari RPJMD, yaitu "Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)". Namun sebagai pelaksana pembangunan bidang perhubungan, Dinas Perhubungan memiliki kewajiban, baik dalam pelayanan publik bidang perhubungan, maupun dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama ataupun target - target lainnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Banjar Tahun 2024.

Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD dilakukan melalui proses menyandingkan antara Rencana Kerja (Renja) Perubahan, Rancangan Awal RKPD Perubahan, dan Analisis Kebutuhan. Hal ini dilakukan agar arah pencapaian target kinerja dapat sesuai dengan apa yang direncanakan.



## BAB III

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan yang direncanakan untuk Periode Tahun 2024 meliputi program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perubahan yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Banjar Tahun 2024 dalam rangka pencapaian visi dan misi.

##### 3.1.1 Faktor-faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan penyusunan rumusan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Banjar tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a) Program dan Kegiatan yang dirumuskan oleh Dinas Perhubungan Kota Banjar harus mendongkrak capaian indikator terhadap target yang telah ditetapkan.
- b) Program dan Kegiatan yang dirumuskan oleh Dinas Perhubungan Kota Banjar mengakomodir usulan dari pemangku kepentingan (Musrenbang dan POKIR).

##### 3.1.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, dalam Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun 2024 dirumuskan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan merumuskan 2 (*dua*) program, 13 (*tiga belas*) kegiatan, dan 31 (*tiga puluh satu*) sub kegiatan. Secara rinci rekapitulasi Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada tabel berikut :



NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU 2024		
		RKPD MURNI	APBD MURNI	PERUBAHAN RKPD
		<b>16,886,993,062</b>	<b>14,791,715,715</b>	<b>16,708,767,059</b>
<b>I.</b>	<b>PROGRAM 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>8,943,358,262</b>	<b>7,173,522,315</b>	<b>7,815,460,959</b>
<b>1.</b>	<b>Kegiatan 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	52,444,000	4,500,000	4,500,000
	Sub Kegiatan 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15,894,000	1,000,000	1,000,000
	Sub Kegiatan 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5,298,000	500,000	500,000
	Sub Kegiatan 1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,584,000	500,000	500,000
	Sub Kegiatan 1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3,884,000	500,000	500,000
	Sub Kegiatan 1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5,324,000	500,000	500,000
	Sub Kegiatan 1.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8,268,000	500,000	500,000
	Sub Kegiatan 1.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8,192,000	1,000,000	1,000,000
<b>2.</b>	<b>Kegiatan 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6,059,354,363</b>	<b>5,370,409,165</b>	<b>6,012,347,809</b>
	Sub Kegiatan 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,053,856,363	5,369,909,165	6,011,847,809
	Sub Kegiatan 1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	5,498,000	500,000	500,000
<b>3</b>	<b>Kegiatan 1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>
	Sub kegiatan 1.3.2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	30,000,000	30,000,000	30,000,000
<b>4</b>	<b>Kegiatan 1.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>211,745,000</b>		
	Sub Kegiatan 1.5.2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	151,745,000		
	Sub Kegiatan 1.5.9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60,000,000		
<b>5.</b>	<b>Kegiatan 1.6 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>506,167,000</b>	<b>166,469,950</b>	<b>166,469,950</b>
	Sub Kegiatan 1.6.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5,000,000	3,430,000	3,430,000
	Sub Kegiatan 1.6.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120,836,500	14,938,600	14,938,600
	Sub Kegiatan 1.6.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	38,652,000	4,998,500	4,998,500
	Sub Kegiatan 1.6.4	7,750,000	7,749,600	7,749,600



	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
	Sub Kegiatan 1.6.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60,381,000	60,355,000	60,355,000
	Sub Kegiatan 1.6.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27,000,000		
	Sub Kegiatan 1.6.7 Fasilitasi Kunjungan Tamu	25,000,000		
	Sub Kegiatan 1.6.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	201,350,000	74,998,250	74,998,250
	Sub Kegiatan 1.6.9 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20,197,500		
<b>6.</b>	<b>Kegiatan 1.7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>70,706,500</b>		
	Sub Kegiatan 1.7.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39,655,500		
	Sub Kegiatan 1.7.2 Pengadaan Mebel	31,051,000		
	Sub Kegiatan 1.7.3 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70,706,500		
<b>7.</b>	<b>Kegiatan 1.8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1,509,482,399</b>	<b>1,461,923,200</b>	<b>1,461,923,200</b>
	Sub Kegiatan 1.8.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,980,000	996,000	996,000
	Sub Kegiatan 1.8.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	376,238,399	312,565,200	312,565,200
	Sub Kegiatan 1.8.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,128,264,000	1,148,362,000	1,148,362,000
<b>8.</b>	<b>Kegiatan 1.9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>503,459,000</b>	<b>140,220,000</b>	<b>140,220,000</b>
	Sub Kegiatan 1.9.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	335,100,000	140,220,000	140,220,000
	Sub Kegiatan 1.9.5 Pemeliharaan Mebel	5,000,000		
	Sub Kegiatan 1.9.6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18,540,000		
	Sub Kegiatan 1.9.7 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	144,819,000		
<b>II.</b>	<b>PROGRAM 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>7,998,780,820</b>	<b>8,893,306,100</b>	<b>8,893,306,100</b>
<b>1.</b>	<b>Kegiatan 2.1 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>	<b>35,000,000</b>		
	Sub Kegiatan 2.1.1 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	35,000,000		
<b>2.</b>	<b>Kegiatan 2.2</b>	<b>6,759,360,800</b>	<b>6,719,360,800</b>	<b>7,994,473,500</b>



	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota</b>			
	Sub Kegiatan 2.1.1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	6,274,240,800	6,274,240,800	7,549,353,500
	Sub Kegiatan 2.1.2 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	485,120,000	445,120,000	445,120,000
<b>3.</b>	<b>Kegiatan 2.3 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>60,000,000</b>	<b>60,000,000</b>	<b>60,000,000</b>
	Sub Kegiatan 2.3.1 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	30,000,000	30,000,000	30,000,000
	Sub Kegiatan 2.3.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	30,000,000	30,000,000	30,000,000
<b>3.</b>	<b>Kegiatan 2.4 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>206,524,000</b>	<b>206,524,000</b>	<b>206,524,000</b>
	Sub Kegiatan 2.4.2 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	30,000,000	30,000,000	30,000,000
	Sub Kegiatan 2.4.3 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	56,524,000	56,524,000	56,524,000
	Sub Kegiatan 2.4.4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	120,000,000	120,000,000	120,000,000
<b>4.</b>	<b>Kegiatan 2.5 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>792,750,000</b>	<b>542,308,600</b>	<b>542,308,600</b>
	Sub Kegiatan 2.5.4 Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	642,750,000	392,311,500	392,311,500
	Sub Kegiatan 2.5.15 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan 2.5.17 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	150,000,000	149,997,100	149,997,100
<b>5.</b>	<b>Kegiatan 2.6 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	<b>60,000,000</b>	<b>60,000,000</b>	<b>60,000,000</b>
	Sub Kegiatan 2.6.1 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota	30,000,000	30,000,000	30,000,000
	Sub Kegiatan 2.6.2 Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	30,000,000	30,000,000	30,000,000



6.	Kegiatan 2.6 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	30,000,000	30,000,000	30,000,000
	Sub Kegiatan 2.6.1 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	30,000,000	30,000,000	30,000,000

3.1.3 Penjelasan jika rumusan program/kegiatan/ subkegiatan tidak sesuai dengan RKPD tahun berjalan, baik jenis program/kegiatan/ subkegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya (jika ada).

Rumusan program dan kegiatan yang telah direncanakan akan dilaksanakan sesuai dengan time schedule, besaran target kinerja, besaran pagu anggaran, dan tempat pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD. Apabila ada program dan kegiatan yang tidak sesuai pelaksanaannya dengan RKPD tentu saja akan berpengaruh pada capaian target kinerja dan realisasi keuangan yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan merupakan acuan setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Renja Perubahan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Banjar Tahun 2024. Penyusunan Renja Perubahan bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD perubahan, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD Perubahan. Rencana Kerja Dinas Perhubungan merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan demikian Program dan Kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam rencana kerja (RENJA).

Rumusan rencana kerja dan pendanaan Perangkat daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut ini :



**Tabel 3.1**  
**"Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024"**  
**Kota Banjar**

**Nama OPD : DINAS PERHUBUNGAN**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Ket.
						Target 2024		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Daya	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2 1 0 5 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	300%	100%	100%	100%	100%	7.173.522.315	7,815,460,959	Kota Banjar	ASN, peralatan & perlengkapan kantor		√	ASN	100%	8.065.962.705	
2 1 0 5 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300%	100%	100%	100%	100%	4,500,000	4,500,000	Kota Banjar	ASN, peralatan & perlengkapan kantor		√	ASN	100%	19,500,000	
2 1 0 5 1	0 0 0 1 1 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1,000,000	1,000,000	Kota Banjar	ASN, peralatan & perlengkapan kantor		√	ASN	2 dokumen	3,000,000	
2 1 0 5 1	0 0 0 1 1 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	500,000	500,000	Kota Banjar	ASN, peralatan & perlengkapan kantor		√	ASN	1 dokumen	2,500,000	





2	1	0	2	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	500,000	500,000	Kota Banjar	ASN, peralatan & perlengkapan kantor	v	ASN	1 dokumen	2,500,000		
2	1	0	2	0	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	500,000	500,000	Kota Banjar	ASN, peralatan & perlengkapan kantor	v	ASN	1 dokumen	2,500,000		
2	1	0	2	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	500,000	500,000	Kota Banjar	ASN, peralatan & perlengkapan kantor	v	ASN	1 dokumen	2,500,000		
2	1	0	2	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	500,000	500,000	Kota Banjar	ASN, peralatan & perlengkapan kantor	v	ASN	1 dokumen	4,000,000		
2	1	0	2	0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	1,000,000	1,000,000	Kota Banjar	ASN, peralatan & perlengkapan kantor	v	ASN	1 dokumen	2,500,000		
2	1	0	2	0	2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tepat waktu</b>	<b>300%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>5,370,409,165</b>	<b>6,012,347,809</b>	<b>Kota Banjar</b>	<b>ASN, peralatan &amp; perlengkapan kantor</b>	v	ASN	<b>100%</b>	<b>5,840,667,605</b>		
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN penerima Gaji	1.944 orang	54 org/bln	54 org/bln	54 org/bln	54 org/bln	5,369,909,165	6,011,847,809	Kota Banjar	ASN, peralatan & perlengkapan kantor	v	ASN	54 orang	5,838,167,605		
2	1	0	2	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	6 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	500,000	500,000	Kota Banjar	ASN, peralatan & perlengkapan kantor	v	ASN	12 dokumen	2,500,000		





2	1	0	2	0	0	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	4,998,500	4,998,500	Kota Banjar	ASN, peralatan & perlengkapan kantor	v	ASN	100%	4,998,500		
2	1	0	2	0	0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	7.749.000	7.749.000	Kota Banjar	ASN, peralatan & perlengkapan kantor	v	ASN	100%	7,749,600		
2	1	0	2	0	0	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	60,355,000	60,355,000	Kota Banjar	ASN, peralatan & perlengkapan kantor	v	ASN	100%	60,355,000		
2	1	0	2	0	0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Per-UU yang Disediakan	36 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen			Kota Banjar	ASN, peralatan & perlengkapan kantor	v	ASN	100%	8,000,000		
2	1	0	2	0	0	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap			Kota Banjar	ASN, peralatan & perlengkapan kantor	v	ASN	100%	5,000,000		
2	1	0	2	0	0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	74,998,250	74,998,250	Kota Banjar	ASN, peralatan & perlengkapan kantor	v	ASN	100%	119,000,000		
2	1	0	2	0	0	0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap			Kota Banjar	ASN, peralatan & perlengkapan kantor	v	ASN	100%	3,000,000		
2	1	0	2	0	0	0	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>300%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			<b>Kota Banjar</b>	<b>ASN, peralatan &amp; perlengkapan kantor</b>	<b>v</b>	<b>ASN</b>	<b>100%</b>	<b>30,000,000</b>		
2	1	0	2	0	0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 unit	0	1 unit	1 unit	1 unit			Kota Banjar	ASN, peralatan & perlengkapan kantor	v	ASN	1 unit	15,000,000		



2	1	0	2	0	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket			Kota Banjar	ASN, peralatan & perlengkapan kantor	v	ASN	10 unit	15,000,000
2	1	0	2	0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300%	100%	100%	100%	100%	1.461.923.200	1.461.923.200	Kota Banjar	ASN, peralatan & perlengkapan kantor	v	ASN	100%	1,474,162,000
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	996,000	996,000	Kota Banjar	ASN, peralatan & perlengkapan kantor	v	ASN	100 buah	2,000,000
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	312,565,200	312,565,200	Kota Banjar	ASN, peralatan & perlengkapan kantor	v	ASN	12 lap	323,800,000
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	1,148,362,000	1,148,362,000	Kota Banjar	ASN, peralatan & perlengkapan kantor	v	ASN	12 lap	1,148,362,000
2	1	0	2	0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300%	100%	100%	100%	100%	140.220.000	140.220.000	Kota Banjar	ASN, peralatan & perlengkapan kantor	v	ASN	100%	390,100,000
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	75 unit	25 unit	25 unit	25 unit	25 unit	140,220,000	140,220,000	Kota Banjar	ASN, peralatan & perlengkapan kantor	v	ASN	20 unit	335,100,000
2	1	0	2	0	0	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	3 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket			Kota Banjar	ASN, peralatan & perlengkapan kantor	v	ASN	10 unit	5,000,000
2	1	0	2	0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	30 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit			Kota Banjar	ASN, peralatan & perlengkapan kantor	v	ASN	20 unit	20,000,000



2	1	0	2	0	0	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	3 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit			Kota Banjar	ASN, peralatan & perlengkapan kantor	v	ASN	1 unit	30,000,000
2	1	0				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>Kinerja lalu lintas kabupaten/kota</b>	<b>300 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>8.893.306.100</b>	<b>8.893.306.100</b>	<b>Kota Banjar</b>	<b>ASN, peraturan perundang-undangan, perlengkapan jalan</b>				<b>7,000,000,000</b>
2	1	0	2	0	1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	300%	100%	100%	100%	100%	7.994.473.500	7.994.473.500	Kota Banjar	ASN, peraturan perundang-undangan, perlengkapan jalan	v	Masyarakat	100%	6,293,476,000
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	30 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	7,549,353,500	7,549,353,500	Kota Banjar	ASN, peraturan perundang-undangan, peralatan kantor	v	Masyarakat	10 unit	5,848,356,000
2	1	0	2	0	0	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang di Rehabilitasi dan di Pemelihara	348 unit	116 unit	116 unit	116 unit	116 unit	445.120.000	445.120.000	Kota Banjar	ASN, peraturan perundang-undangan, peralatan kantor	v	Masyarakat	116 unit	445,120,000
2	1	0	2	0	4	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Cakupan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	300%	100%	100%	100%	100%	60.000.000	60.000.000	Kota Banjar	ASN, peraturan perundang-undangan, peralatan kantor	v	Masyarakat	100%	60,000,000



2	1	0	2	0	0	0	0	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah laporan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	6 lap	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	30.000.000	30.000.000	Kota Banjar	ASN, peraturan perundang-undangan, peralatan kantor	v	Masyarakat	2 lap	30,000,000
2	1	0	2	0	0	0	0	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	6 lap	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	30.000.000	30.000.000	Kota Banjar	ASN, peraturan perundang-undangan, peralatan kantor	v	Masyarakat	2 lap	30,000,000
2	1	0	2	0	0	0	0	5	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>Persentase pelayanan uji berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>300%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>206.524.000</b>	<b>206.524.000</b>	Kota Banjar	ASN, peraturan perundang-undangan, peralatan kantor	v	Masyarakat	<b>100%</b>	<b>206,524,000</b>
2	1	0	2	0	0	0	0	3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang teregistrasi	4.500 unit	1500 unit	1500 unit	1500 unit	1500 unit	30.000.000	30.000.000	Kota Banjar	ASN, peraturan perundang-undangan, peralatan kantor	v	Masyarakat	1500 unit	30,000,000
2	1	0	2	0	0	0	0	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4.500 buah	4.500 buah	1500 buah	1500 buah	1500 buah	56.524.000	56.524.000	Kota Banjar	ASN, peraturan perundang-undangan, peralatan kantor	v	Masyarakat	1500 buah	56,524,000



2	1	0	2	0	0	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dipelihara	3 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	120.000.000	120.000.000	Kota Banjar	ASN, peraturan perundang-undangan, peralatan kantor	√	Masyarakat	1 unit	120,000,000
2	1	0	2	0	6	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	300%	100%	100%	100%	100%	542.308.600	542.308.600	Kota Banjar	ASN, peraturan perundang-undangan, perlengkapan jalan	√	Masyarakat	100%	380,000,000
2	1	0	2	0	0	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	18 lap	6 lap	6 lap	6 lap	6 lap	392,311,500	392,311,500	Kota Banjar	ASN, peraturan perundang-undangan, perlengkapan jalan	√	Masyarakat	6 lap	200,000,000
2	1	0	2	0	0	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	36 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	149,997,100	149,997,100	Kota Banjar	ASN, peraturan perundang-undangan, perlengkapan jalan	√	Masyarakat	12 lap	30,000,000
2	1	0	2	0	0	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	3 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap			Kota Banjar	ASN, peraturan perundang-undangan	√	Masyarakat	1 lap	150,000,000
2	1	0	2	0	8	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Cakupan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	300%	100%	100%	100%	100%	60.000.000	60.000.000	Kota Banjar	ASN, peraturan perundang-undangan, perlengkapan jalan	√	Masyarakat	100%	60,000,000







Penjelasan dari tabel diatas adalah sebagai berikut :

Rencana Kinerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan yang dibuat mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2024 dalam menunjang tercapainya visi dan misi serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan tahun 2024. Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RENJA Perubahan Tahun 2024 merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2024. Renja Perubahan disusun tidak terlepas dari dokumen Renstra dan RKPD Perubahan dimana program/ kegiatan yang dilaksanakan harus selalu sejalan. Seperti yang telah di bahas pada bab sebelumnya bahwa Dinas Perhubungan Kota Banjar melaksanakan 2 (*dua*) program, 13 (*tiga belas*) kegiatan, dan 31 (*tiga puluh satu*) sub kegiatan. Dari hasil analisis kebutuhan tahun 2024, terdapat kebutuhan dana sebesar Rp. 16.632.148.659,- (*enam belas milyar enam ratus tiga puluh dua juta serratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah*) dengan Sumber Dana dari APBD Kota Banjar dan Bantuan Keuangan Provinsi.



## BAB IV

### PENUTUP

Evaluasi capaian Kinerja yang telah dibahas pada Bab sebelumnya mencerminkan bahwa masih ada beberapa kegiatan yang belum terdani sesuai kebutuhan dan sudah tidak sesuai lagi dengan pagu indikatif yang tertuang di Renstra, sehingga mempengaruhi target capaian kinerja. Untuk Program/ Kegiatan yang belum tercapai capaian kinerjanya akan di usulkan kembali pada Anggaran Tahun berikutnya sehingga capaian kinerja pada akhir Renstra akan tercapai sesuai target yang ditetapkan.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Dinas Perhubungan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Perubahan Tahun 2024 dengan efektif dan efisien.
2. Renja Perubahan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran perubahan Tahun 2024, dimana Renja Perubahan Tahun 2024 dijabarkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan TA 2024.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan, seluruh aparatur Dinas Perhubungan secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.
4. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
5. Renja Perubahan Tahun 2024 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan



hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Besar harapan kami, dengan tersusunnya Renja Perubahan Tahun 2024 dapat dipergunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2024, sarana peningkatan kinerja Dinas dan dapat dijadikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di tahun berikutnya.

Banjar, 17 Juli 2024  
Kepala Dinas Perhubungan  
Kota Banjar,



  
**ASEP SUTARNO, S.H., M.Si.**  
Pembina IV/a  
NIP. 19680508 200604 1 008



## KATA PENGANTAR


Dinas Perhubungan merupakan salah satu dinas pada Pemerintahan Kota Banjar yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan.

Dalam rangka meningkatkan pencapaian good governance dan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mendorong akuntabilitas kinerja kearah terwujudnya pemerintah yang baik dan terpercaya, maka Dinas Perhubungan Menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

Diharapkan perencanaan ini dapat dijadikan pedoman dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi Dinas Perhubungan, serta memberikan bahan masukan terhadap evaluasi dan pengukuran kinerja Dinas Perhubungan.

Banjar, 17 Juli 2024  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA BANJAR,



  
**ASEP SUTARNO, S.H., M.Si.**  
Pembina IV/a  
NIP. 19680508 200604 1 008



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022</b>	<b>5</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	5
2.2. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	16
<b>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>18</b>
3.1. Program dan Kegiatan .....	18
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>32</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2024 .....	8
Tabel 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Setelah Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 .....	23

